



**PERUBAHAN
RENCANA KERJA
SEKRETARIAT DPRD
KOTA SURABAYA 2025**



**SEKRETARIAT DPRD
PEMERINTAH KOTA SURABAYA**

Surabaya

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai amanat Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, dan Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan di daerah masing - masing harus menyusun rencana pembangunan. Rencana pembangunan menurut undang - undang tersebut dibagi menjadi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk rencana pembangunan tahunan.

Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Surabaya disusun sesuai dengan Tugas dan Fungsinya sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Kota Surabaya Nomor 68 Tahun 2021 Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya serta mengacu RPJM Kota Surabaya.

Tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kota Surabaya diatur dalam Peraturan Walikota Kota Surabaya Nomor 68 Tahun 2021 Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya.

Dalam Peraturan Walikota tersebut, kedudukan sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD, dengan tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan. Oleh karena itu Rencana Kerja Sekretariat DPRD disusun berdasarkan isu strategis dan rumusan permasalahan yang terjadi di Sekretariat DPRD Kota Surabaya.

Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Surabaya keberadaannya sebagai bahan penyusunan RKPD Kota Surabaya, yang selanjutnya digunakan sebagai landasan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Surabaya disusun dalam rangka mewujudkan pertanggungjawaban Instansi Pemerintah dalam mencapai misi dan tujuan organisasi.

1.2 Landasan Hukum

Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Surabaya disusun berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4287);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia) Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah ;
12. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surabaya Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 5 Noreg);
13. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 9);
14. Peraturan Walikota Kota Surabaya Nomor 68 Tahun 2021 Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya;
15. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 41 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 97 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021 -2026 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2022 Nomor 42).
16. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 52 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Surabaya Tahun 2025.

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Sekretariat DPRD disusun dengan maksud untuk :

- a. Menyediakan acuan resmi bagi Sekretariat DPRD Kota Surabaya dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan dibiayai dari APBD, dan
- b. Menyediakan tolok ukur bagi evaluasi dan penilaian kinerja Sekretariat DPRD Kota Surabaya.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Surabaya adalah :

- a. Memberikan pertanggungjawaban kepada pemberi amanah.
- b. Memberikan dasar bagi pengambilan keputusan untuk perbaikan dalam mencapai efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mencapai Misi dan Visi.
- c. Memberikan masukan untuk memperbaiki perencanaan.

1.4 Sistematika Penulisan

Dokumen Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Surabaya disusun dengan

sistematika sebagai berikut :

Bab I PENDAHULUAN

Pada Bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Rencana Kerja 2024

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

Bab II EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Bab ini menjelaskan mengenai evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Surabaya tahun lalu dan capaian Renstra Sekretariat DPRD Kota Surabaya, Analisis kinerja pelayanan Sekretariat DPRD Kota Surabaya, Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kota Surabaya dan Review terhadap Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Surabaya.

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Surabaya Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD Kota Surabaya

Bab III TUJUAN DAN SASARAN SEKRETARIAT DPRD KOTA SURABAYA

Bab ini menjelaskan mengenai telaahan terhadap kebijakan Kota Surabaya, Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Surabaya.

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Bab IV PENUTUP

Pada Bab ini menjelaskan terkait dengan catatan penting, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD tahun 2025 dilaksanakan dalam 2 program, yaitu **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dan Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD**. Program – program tersebut diwujudkan dalam 10 kegiatan. Sedangkan untuk tahun 2023 dilaksanakan dalam 2 program, yaitu **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dan Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD**. Program – program tersebut diwujudkan dalam 10 kegiatan.

Hasil evaluasi renja Sekretariat DPRD tahun 2025 sampai dengan triwulan I pada tabel 2.1 dapat dijabarkan beberapa kegiatan belum terserap optimal terutama pada TW I, dikarenakan pada kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD pada prosesnya bahwa Raperda masih dalam proses pembahasan Badan Pembentukan Perda DPRD Kota Surabaya Bersama dengan Tim Ahli (Tenaga Pakar).:

Tabel 2.1
Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD sampai dengan Triwulan I Tahun 2025

Kode	Sasaran	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Trwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025 (%)	
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I	K	Rp. (000)	II	K	Rp. (000)	III	K	Rp. (000)	IV	K	Rp. (000)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=8+9+10+11					13 = 6 + 12		14 = 13/5 x100%			
4		Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan																			
4.02		Sekretariat DPRD																			
4.02.01		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		211.561.797	117.381.352	198.903.813	24.456.333	-	-	-	-	24.456.333					24.456.333			11,56%	
			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan [609]	94 %	92,74 %	93,5 %	93,46 %	-	-	-	-	-					93,46 %		99,43%		
4.02.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		15.979.496		15.828.136	2.869.646		-	-	-						2.869.646			17,96%	
			Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN [895]	100 %	100 %	100 %	100 %										100 %		100,00%		
4.02.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN [1374]		15.979.496	51 Orang/bulan	15.828.136	2.869.646	-	-	-	-						2.869.646			17,96%	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN [5749]	58 Orang/bulan	51 Orang/bulan		50 Orang/bulan										50 Orang/bulan		86,21%		
4.02.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		30.164.551		35.621.377	5.175.915		-	-	-						5.175.915			17,16%	
			Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran [896]	100 %	100 %	100 %	100 %										100 %		100,00%		
4.02.01.2.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor [1375]		30.164.551		35.621.377	5.175.915	-	-	-	-						5.175.915			17,16%	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Dilevelkan [5750]	11 Paket	11 Paket		11 Paket										11 Paket		100,00%		
4.02.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		5.459.328		5.333.567	412.686		-	-	-						412.686			7,56%	
			Rata-rata waktu penyelesaian Kelengkapan sarana dan prasarana rapat [897]	1 Hari	1,02 Hari		1 Hari										1 Hari		100,00%		
4.02.01.2.09.0010		Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya [1376]		5.459.328		5.333.567	412.686		-	-	-						412.686			7,56%	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung	204 Unit	206 Unit		39 Unit										39 Unit		19,12%		

Kode	Sasaran	Usuran / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025 (%)			
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I	Rp.(000)	K	Rp. (000)	II	Rp. (000)	III	Rp. K (000)	IV	Rp. K (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	13 = 6 + 12	14 = 13/5 x100%
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=8+9+10+11	13 = 6 + 12	14 = 13/5 x100%												
			Kantor atau Bangunan lainnya yang dipelihara/Direhabilitasi [5751]																						
4.02.01.2.14		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan		96.495.857			2.991.074	-	-	-	2.991.074	2.991.074	3.10%												
			Rata-rata waktu Penyajian kelengkapan administrasi perjalanan Dinas [898]	1 Hari	1 Hari	1 Hari	1 Hari	-	-	-	1 Hari	1 Hari	100.00%												
4.02.01.2.14.0001		Fasilitasi Keprotokolan [1377]		96.495.857			2.991.074	-	-	-	2.991.074	2.991.074	3.10%												
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan [5752]	96 Laporan	97 Laporan	96 Laporan	24 Laporan	-	-	-	24 Laporan	24 Laporan	25.00%												
4.02.01.2.15		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD		59.974.263			12.967.543	-	-	-	12.967.543	12.967.543	21.62%												
			Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD [899]	100 %	100 %	100 %	100 %	-	-	-	100 %	100 %	100.00%												
4.02.01.2.15.0001		Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD [1378]		59.974.263			12.967.543	-	-	-	12.967.543	12.967.543	21.62%												
			Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD [5753]	50 Orang/Bulan	50 Orang/Bulan	50 Orang/Bulan	50 Orang/Bulan	-	-	-	50 Orang/Bulan	50 Orang/Bulan	100.00%												
4.02.01.2.16		Layanan Administrasi DPRD		3.488.302			39.468	-	-	-	39.468	39.468	1.13%												
			Rata-rata Waktu Penyelesaian Laporan Perjalanan Dinas [900]	2 Hari	1,27 Hari	2 Hari	1 Hari	-	-	-	1 Hari	1 Hari	50.00%												
4.02.01.2.16.0003		Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD [1379]		3.488.302			39.468	-	-	-	39.468	39.468	1.13%												
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD [5754]	36 Laporan	11 Laporan	36 Laporan	2 Laporan	-	-	-	2 Laporan	2 Laporan	5.56%												
4.02.02		Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd		50.604.084			21.901.382	-	-	-	21.901.382	21.901.382	43.26%												
			Persentase pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD yang difasilitasi [607]	100 %	100.00 %	100 %	100.00 %	-	-	-	100.00 %	100.00 %	100.00%												
4.02.02.2.01		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD		5.204.429			42.335	-	-	-	42.335	42.335	0.81%												
			Jumlah dokumen kajian kebijakan dan rancangan peraturan	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	0 Dokumen	-	-	-	0 Dokumen	0 Dokumen	0.00%												

Kode	Sasaran	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025 (%)	
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III		IV		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)
										K	Rp.(000)	K	Rp. (000)	K	Rp. K (000)	K	Rp. K (000)						
1		3	4 daerah yang dibahas [891]		5			7	8		9		10		11		12=8+9+10+11	13 = 6 + 12	14 = 13/5 x100%				
4.02.02.2.01.0001		Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah [1358]			5,204,429			3,966,580	42.335		-		-		-		42.335	42.335			0,81%		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah [5745]	6 Dokumen		6 Dokumen		6 Dokumen	0 Dokumen		-		-		0 Dokumen		0 Dokumen	0 Dokumen		0,00%			
4.02.02.2.04		Peningkatan Kapasitas DPRD			23.981,751			27.781,433	6.405.506		-		-		-		6.405.506	6.405.506			26,71%		
			Jumlah Pimpinan dan Anggota DPRD yang mendapatkan peningkatan kapasitas [892]	50 Orang		28 Orang		50 Orang	19 Orang		-		-		19 Orang		19 Orang	19 Orang		38,00%			
4.02.02.2.04.0002		Pendalaman Tugas DPRD [3201]			1,976,169			1.876,347	109.000		-		-		-		109.000	109.000			5,52%		
			Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD [5755]	2 Dokumen		6 Dokumen		2 Dokumen	3 Dokumen		-		-		3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen		150,00%			
4.02.02.2.04.0008		Publikasi dan Dokumentasi DPRD [1371]			22.005,582			25.905,086	6.296.506		-		-		-		6.296.506	6.296.506			28,61%		
			Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD [5746]	4 Dokumen		4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen		-		-		4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen		100,00%			
4.02.02.2.05		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat			16.446,120			40.676,058	15.083,833		-		-		-		15.083,833	15.083,833			91,72%		
			Jumlah dokumen pelaksanaan reses [893]	3 Dokumen		2 Dokumen		3 Dokumen	1 Dokumen		-		-		1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen		33,33%			
4.02.02.2.05.0003		Pelaksanaan Reses [1372]			16.446,120			40.676,058	15.083,833		-		-		-		15.083,833	15.083,833			91,72%		
			Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses [5747]	150 Dokumen		100 Dokumen		150 Dokumen	50 Dokumen		-		-		50 Dokumen		50 Dokumen	50 Dokumen		33,33%			
4.02.02.2.08		Facilitasi Tugas DPRD			4.971,784			4.680,819	369,708		-		-		-		369,708	369,708			7,44%		
			Rata rata waktu penyelesaian risalah rapat perpurna dan notulensi rapat [894]	2 Hari		1 Hari		2 Hari	1 Hari		-		-		1 Hari		1 Hari	1 Hari		50,00%			
4.02.02.2.08.0001		Koordinasi dan Pelaksanaan Tugas DPRD [1373]			4.971,784			4.680,819	369,708		-		-		-		369,708	369,708			7,44%		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi	36 Dokumen		55 Dokumen		36 Dokumen	11 Dokumen		-		-		11 Dokumen		11 Dokumen	11 Dokumen		30,56%			

[illegible]

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN SEKRETARIAT DPRD KOTA SURABAYA

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Perubahan Renja Sekretariat DPRD tahun 2025 mengacu pada Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025 yang pada umumnya dapat berupa perubahan output kegiatan, target capaian kinerja serta kebutuhan dana/pagu indikatif. Perubahan Renja Sekretariat DPRD Tahun 2025 dirumuskan dalam 2 program, yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dan Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD. Program - program tersebut diwujudkan dalam 10 kegiatan. Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Sekretariat DPRD Kota Surabaya Tahun 2025, dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut ini:

Tabel 3.1
Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan
Sekretariat DPRD
Tahun 2025

Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan					Catatan Penting
No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	93,5 %	198,903,813,192	4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	93,5 %	168,047,253,063	
	4.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100 %	15,828,136,399	4.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100 %	14,856,668,809	
	4.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Sekretariat DPRD	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	51 Orang/bulan	15,828,136,399	4.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Sekretariat DPRD	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	51 Orang/bulan	14,856,668,809	
	4.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100 %	35,621,376,507	4.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100 %	34,918,543,413	
	4.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Sekretariat DPRD	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	11 Paket	35,621,376,507	4.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Sekretariat DPRD	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	11 Paket	34,918,543,413	
	4.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Rata-rata waktu penyediaan Kelengkapan sarana dan prasarana rapat	≤ 1 Hari	5,333,566,626	4.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Rata-rata waktu penyediaan Kelengkapan sarana dan prasarana rapat	≤ 1 Hari	9,126,569,570	
	4.02.01.2.09.0010 Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sekretariat DPRD	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	204 Unit	5,333,566,626	4.02.01.2.09.0010 Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sekretariat DPRD	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	204 Unit	9,126,569,570	
	4.02.01.2.14 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan		Rata-rata waktu Penyediaan kelengkapan administrasi perjalanan Dinas	≤ 1 Hari	85,215,577,527	4.02.01.2.14 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan		Rata-rata waktu Penyediaan kelengkapan administrasi perjalanan Dinas	≤ 1 Hari	52,390,315,138	
	4.02.01.2.14.0001 Fasilitas Keprotokolan	Sekretariat DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Keprotokolan	96 Laporan	85,215,577,527	4.02.01.2.14.0001 Fasilitas Keprotokolan	Sekretariat DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Keprotokolan	96 Laporan	52,390,315,138	
	4.02.01.2.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD		Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD	100 %	54,522,056,860	4.02.01.2.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD		Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD	100 %	54,522,056,860	

No	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	4.02.01.2.15.0001 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Sekretariat DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	50 Orang/Bulan	54,522,056,860	4.02.01.2.15.0001 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Sekretariat DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	50 Orang/Bulan	54,522,056,860	
	4.02.01.2.16 Layanan Administrasi DPRD		Rata-rata Waktu Penyelesaian Laporan Perjalanan Dinas	≤ 2 Hari	2,383,099,273	4.02.01.2.16 Layanan Administrasi DPRD		Rata-rata Waktu Penyelesaian Laporan Perjalanan Dinas	≤ 2 Hari	2,233,099,273	
	4.02.01.2.16.0003 Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Sekretariat DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	36 Laporan	2,383,099,273	4.02.01.2.16.0003 Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Sekretariat DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	8 Laporan	2,233,099,273	
2	4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD		Persentase pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD yang difasilitasi	100 %	77,104,890,508	4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD		Persentase pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD yang difasilitasi	100 %	86,620,090,050	
	4.02.02.2.01 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD		Jumlah dokumen kajian kebijakan dan rancangan peraturan daerah yang dibahas	6 Dokumen	3,966,579,925	4.02.02.2.01 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD		Jumlah dokumen kajian kebijakan dan rancangan peraturan daerah yang dibahas	6 Dokumen	3,179,922,586	
	4.02.02.2.01.0001 Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	6 Dokumen	3,966,579,925	4.02.02.2.01.0001 Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	6 Dokumen	3,179,922,586	
	4.02.02.2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD		Jumlah Pimpinan dan Anggota DPRD yang mendapatkan peningkatan kapasitas	50 Orang	27,781,432,940	4.02.02.2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD		Jumlah Pimpinan dan Anggota DPRD yang mendapatkan peningkatan kapasitas	50 Orang	31,188,648,666	
	4.02.02.2.04.0002 Pendalaman Tugas DPRD	Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	2 Dokumen	1,876,347,250	4.02.02.2.04.0002 Pendalaman Tugas DPRD	Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	2 Dokumen	2,221,500,000	
	4.02.02.2.04.0008 Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	4 Dokumen	25,905,085,690	4.02.02.2.04.0008 Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	4 Dokumen	28,967,148,666	
	4.02.02.2.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat		Jumlah dokumen pelaksanaan reses	3 Dokumen	40,676,058,451	4.02.02.2.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat		Jumlah dokumen pelaksanaan reses	3 Dokumen	47,787,361,435	
	4.02.02.2.05.0003 Pelaksanaan Reses	Sekretariat DPRD	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	150 Dokumen	40,676,058,451	4.02.02.2.05.0003 Pelaksanaan Reses	Sekretariat DPRD	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	150 Dokumen	47,787,361,435	
	4.02.02.2.08 Fasilitas Tugas DPRD		Rata rata waktu penyelesaian risalah rapat paripurna dan notulensi rapat	≤ 2 Hari	4,680,819,192	4.02.02.2.08 Fasilitas Tugas DPRD		Rata rata waktu penyelesaian risalah rapat paripurna dan notulensi rapat	≤ 2 Hari	4,464,157,363	
	4.02.02.2.08.0001 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi	36 Dokumen	4,680,819,192	4.02.02.2.08.0001 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi	36 Dokumen	4,464,157,363	

		Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Catatan Penting
No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif		
			Pelaksanaan Tugas DPRD					Pelaksanaan Tugas DPRD				

BAB IV PENUTUP

Perubahan Renja Sekretariat DPRD Tahun 2025 merupakan rencana pelaksanaan kegiatan Sekretariat DPRD pada tahun 2025 yang dalam penyusunannya mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 23 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 52 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya Tahun 2025.

Perubahan Renja Sekretariat DPRD Tahun 2025 disusun melalui kaidah perencanaan strategis dan telah memperhatikan keselarasan dengan perencanaan di atasnya, untuk mewujudkan sistem perencanaan pembangunan yang terpadu dan optimal, sebagai perwujudan kinerja pemerintahan yang baik dan akuntabel sesuai tugas dan fungsinya.

Surabaya, 30 Juni 2025

Sekretaris DPRD,



Ir. MUSDIQ ALI SUHUDI, MT.

Pembina Utama Muda / IVc

196710071994031006